

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai pendapatan yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan tersebut diperoleh dari penerimaan negara yang didapat dari perancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN pengelolaan keuangan negara, dan pemerintah memiliki peran untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara agar semua kegiatan pemerintahan dapat meningkatkan pendapatan. Pengelolaan keuangan negara tersebut memiliki manfaat untuk kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dinamis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Negara, maka perlu diciptakan langkah strategis untuk memberdayakan sumber-sumber penerimaan negara (dalam Nanang, 2017).

Dalam UU nomor 17 tahun 2003, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Maka dalam setiap bulan maupun tahun negara akan menerima pendapatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Penerimaan Negara dibedakan menjadi penerimaan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Menurut UU No. 1 Tahun 2010 Penerimaan Negara yaitu semua pendapatan atau penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin

maupun pembangunan (Suryadi, 2006). Penerimaan Negara bukan pajak merupakan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Menurut UU No. 2 Tahun 2000 (Ariadi, 2009) Penerimaan hibah yaitu penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.

Penerimaan negara terbesar didapat dari penerimaan pajak yang dibayar masyarakat kepada negara, tetapi pemerintah berusaha agar penerimaan negara bukan pajak juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Penerimaan negara bukan pajak timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam (Hari, 2014).

Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah Kementerian Perindustrian. Pada penerimaan negara bukan pajak BBKKP memiliki sistem akuntansi dan prosedur dalam pelayanannya. Pendapatan negara salah satunya didapat dari BBKKP dengan jenis penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara yang diterima oleh BBKKP didapat dari jasa pelayanan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan, teknis pengujian dan kalibrasi, pelatihan teknis, inspeksi teknik, teknis mesin, teknis sertifikasi, teknis konsultasi dan pada bidang perindustrian yang bekerjasama dengan pihak lain.

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem akuntansi yaitu

formulir, catatan, dan laporan yang dibutuhkan manajemen agar memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2011). Dalam sistem akuntansi terdapat prosedur, prosedur tersebut merupakan kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, dibuat untuk menjamin secara keseluruhan transaksi perusahaan yang akan terjadi berulang-ulang. Jadi, sistem akuntansi terdiri dari jaringan prosedur-prosedur yang berkelanjutan, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal atau kegiatan yang saling bersangkutan.

Sistem akuntansi penerimaan negara bukan pajak yang tidak sesuai dengan prosedur dapat menimbulkan kesalahan pada pelaksanaannya. Pemisahan tanggung jawab yang merupakan unsur dari sistem pengendalian intern, setiap fungsi memiliki wewenang untuk melakukan suatu kegiatan dan fungsi tersebut tidak boleh diberi tanggung jawab penuh yang melebihi dari fungsi itu sendiri. Contohnya salah satu pegawai pada instansi mempunyai dua tugas sekaligus yang dimana akan memicu terjadinya salah perhitungan atau tidak fokus dalam melaksanakan tugas tersebut, sehingga tidak sepenuhnya kepercayaan akan data akuntansi yang dihasilkan. Tanggung jawab yang diberikan itu dapat menimbulkan praktik yang tidak sehat dalam melaksanakan tugas.

Dari uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem akuntansi dan prosedur penerimaan negara bukan pajak pada BBKPP, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Sistem Akuntansi**

dan Prosedur Penerimaan Negara bukan Pajak di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem akuntansi, prosedur, dan penyetoran dari penerimaan negara bukan pajak di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem akuntansi, prosedur, dan penyetoran dari penerimaan negara bukan pajak di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambahkan pengetahuan tentang sistem akuntansi, prosedur, dan penyetoran, dari penerimaan negara bukan pajak di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi yang berguna bagi instansi sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan sistem akuntansi yang ada pada bagian bendahara penerimaan.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar permasalahan tidak keluar dari rumusan masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan menyangkut sistem akuntansi, prosedur, dan penyetoran, dari penerimaan negara bukan pajak di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta.

F. Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan dan didapat dengan datang langsung ke BBKPP. Penulis mengumpulkan bagaimana sistem akuntansi dan prosedur dari penerimaan negara bukan pajak. Data sekunder didapat melalui buku, jurnal, internet dan lain-lain.

2. Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu pengumpulan data bersifat langsung dimana penulis langsung melihat dan mengamati sistem akuntansi dan prosedur penerimaan negara bukan pajak di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, maka penulis akan mendapatkan informasi dari teknik observasi tersebut.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan secara langsung terkait dengan rumusan masalah yang dibahas oleh penulis.

- c. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui buku, tugas akhir, skripsi, jurnal, internet atau sumber lain yang terdapat pembahasan tersebut.